



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2024

Inspektorat Kota Sibolga

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kota Sibolga perlu menyusun Laporan Kinerja dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Sibolga atas kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis di Inspektorat Kota Sibolga, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat Kota Sibolga dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Sibolga pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan transparansi dan akuntabel.

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Sibolga ini memiliki dua fungsi utama yaitu:

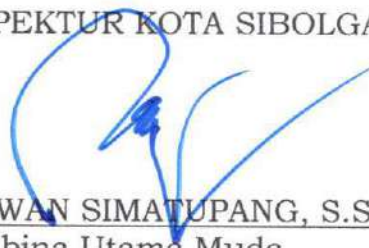
- **Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Kota Sibolga dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
- **Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) atas pencapaian kinerja Inspektorat dan sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa

mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebijakan.

Dengan demikian kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Sibolga di masa yang akan datang.

Sibolga, Februari 2025

INSPEKTUR KOTA SIBOLGA,



ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos. MSP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
Sumber Daya Aparatur.....	9
Sumber Daya Keuangan.....	12
Sarana dan Prasarana Aset.....	12
1.3 Tujuan.....	14
1.4 Dasar Hukum.....	14
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	17
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	22
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja	28
2.5 Perencanaan Anggaran	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	36
3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	37
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	39
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	40
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	48
3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	49
3.2 Realisasi Anggaran.....	66
BAB IV PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender.....	11
Tabel 1.3	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon/ Fungsional Berdasarkan Gender	11
Tabel 1.4	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Berdasarkan Gender.....	11
Tabel 1.5	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 1.6	Jumlah Aset Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024	13
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat.....	21
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	27
Tabel 2.6	Pengukuran Indikator Kerja Utama	30
Tabel 2.7	Daftar Perencanaan Anggaran Belanja Tahun 2024.....	32
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	36
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	37
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024.....	39
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	40
Tabel 3.5	Analisis keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	41
Tabel 3.6	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP.....	44
Tabel 3.7	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI sampai dengan Tahun 2024.....	45
Tabel 3.8	Rekapitulasi Pengaduan dan Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat.....	46
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	49
Tabel 3.11	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50
Tabel 3.12	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	54
Tabel 3.13	Reviu Kinerja Tahun 2024.....	55
Tabel 3.14	Riviu Keuangan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.15	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan APIP.....	64
Tabel 3.16	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.....	65
Tabel 3.17	Matriks Tindaklanjuti SKTJM Tahun Anggaran 2024	66
Tabel 3.18	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	67

Tabel 3.19	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024.....	69
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran dan Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun 2024.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sibolga	9
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Sibolga Berdasarkan Gender.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Kota Sibolga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 merupakan capaian kinerja tahun ke- empat dari RPJMD Tahun 2021-2026. Penilaian dan Pelaporan Kinerja



Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Inspektorat Kota Sibolga :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Sibolga, mempunyai tugas :

1. Inspektur

Tugas : membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektur Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan



keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas : Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur lingkungan Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretaris Inspektorat Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama
- Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama
- Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama
- Penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat meliputi urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan inspektorat
- Penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat meliputi urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan inspektorat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

a. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas : Memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan



penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah dan barang milik negara di lingkungan Inspektorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Inspektorat Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, tata laksana dan kearsipan
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan dokumentasi dan kepustakaan
- Mengoordinasikan penyajian bahan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP)
- Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atau pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur Inspektorat Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan

informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja

- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur
- Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan
- Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur
- Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup : 1. audit operasional 2. audit tujuan tertentu atas pelanggaran disiplin aparatur 3. audit kinerja 4. penguatan akuntabilitas kinerja (upg, reviu laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi laporan kinerja sopd dan lain lain) 5. penataan reformasi birokrasi (spip, kapabilitas apip, survey penilaian integritas, pmprb-online, zona integritas dan lain lain) 6. pengawasan lainnya terkait urusan pemerintahan umum dan aparatur
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas
- Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur
- Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan

4. Inspektur Pembantu Bidang Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan terhadap



pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan di bidang kesejahteraan masyarakat

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektur Pembantu Bidang Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
- Kegiatan pengawasan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat
- Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan
- Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup : 1. audit operasional 2. audit tujuan tertentu atas pengaduan organisasi perangkat daerah 3. audit kinerja 4. penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah (evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, audit operasional pemerintah daerah dan lain lain) 5. audit organisasi dan lembaga lainnya; dan 6. pengawasan lainnya terkait urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat
- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas
- Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat, pemerintah daerah, urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat

- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan

5. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan terhadap pengaduan di bidang ekonomi pembangunan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pengawasan urusan keuangan, barang milik daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi
- Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan
- Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan keuangan, barang milik daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang mencakup : 1. audit operasional 2. audit tujuan tertentu atas kerugian keuangan daerah dan barang milik daerah 3. audit kinerja 4. penguatan akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah (reviu LKPD, reviu RPJMD, reviu Rensta, reviu RKPD, reviu PBJ, reviu RKA, monitoring dan evaluasi barang milik daerah dan lainnya) 5. pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran, pemeriksaan lhkpn, lhkasn dan penerimaan pelaporan gratifikasi



yang melibatkan aparat sipil negara atau penyelenggara negara serta kersupgah 6. pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian, pengembangan pemberantasan korupsi, pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi 7. koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait yang melaksanakan pelayanan publik

- Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan keuangan, barang milik daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi
- Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas
- Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan keuangan dan barang milik daerah
- Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan

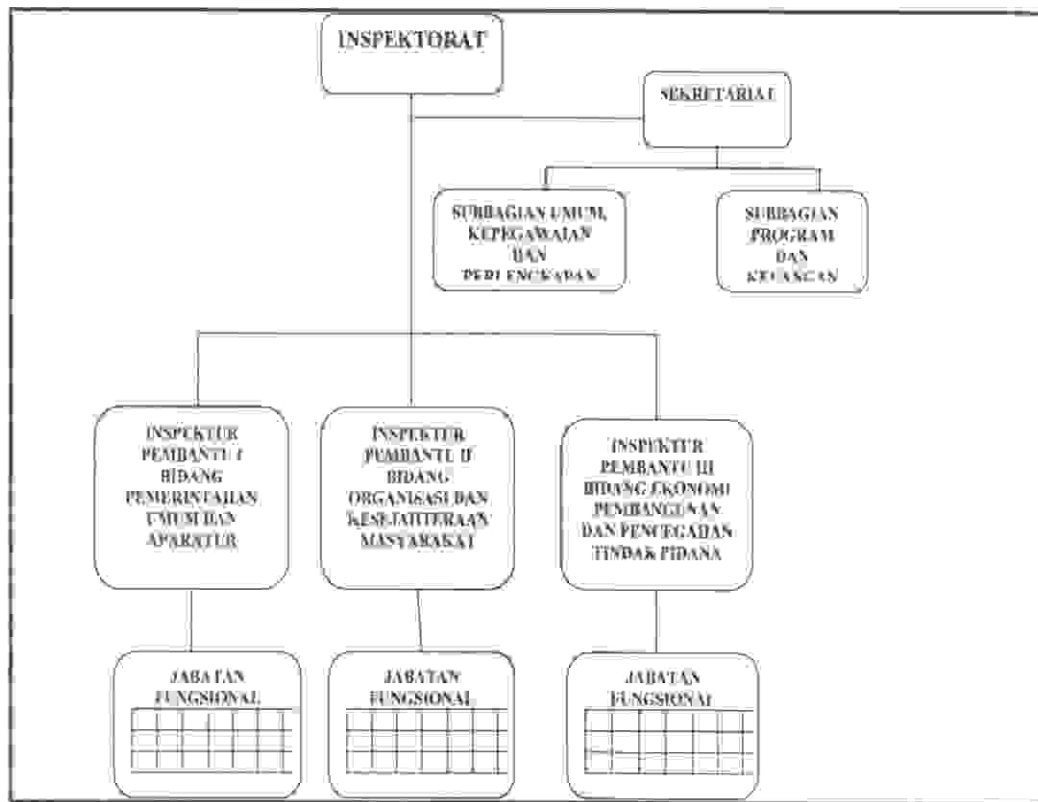
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Sibolga. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Sibolga.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat



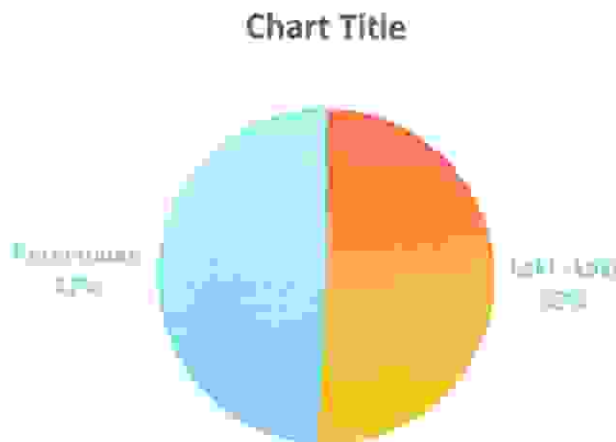
Sumber : Peraturan Wali Kota Sibolga nomor 1 Tahun 2020

1.2.2 Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Kota Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak oleh 53 (lima puluh tujuh) orang, dengan rincian: 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris, 3 Orang Inspektur Pembantu, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 1 orang analis keuangan, 21 Fungsional PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 15 Auditor dan 12 Jabatan Fungsional Umum (JFU). Bila dilihat dari Jenis Kelamin, komposisi pegawai Inspektorat Kota Sibolga sudah cukup seimbang dengan perimbangan jumlah PNS laki – laki sebanyak 25 orang (47%) dan perempuan 28 orang (53%).



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Inspektorat berdasarkan Gender Tahun 2024



Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 71 Orang, jumlah pegawai yg ada 53 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 18 orang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
per 31 Desember 2024

No	Eselon/Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jumlah	SD	SMP	SM A/S LTA	D3	S1	S2	Jumlah
1	Eselon II				1	1						1	1
2	Eselon III				3	3						3	3
3	Eselon IV			1		1			1				1
4	JFT			28	8	36					28	8	36
5	JFU		3	7	2	12		1	2	2	6	1	12
Jumlah		0	3	36	14	53	0	1	3	2	34	13	53
Persentase		0 %	5 %	71 %	24 %		0 %	2 %	5 %	4 %	65 %	25 %	



Tabel 1.2

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan menurut Gender

No	Pangkat/ Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	7	7	14
2	Golongan III	16	20	36
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		24	29	53

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I			0
2	Eselon II	1		1
3	Eselon III	1	2	3
4	Eselon IV		1	1
5	JFT	18	18	36
6	JFU	5	7	12
Jumlah		25	28	53

Tabel 1.4

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu menurut Gender

No.	Pangkat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Auditor Pertama	1		1
2	Auditor Muda	4	6	10
3	Auditor Madya	2	2	4
4	P2UPD Pertama	3	5	8
5	P2UPD Muda	7	3	10
6	P2UPD Madya	1	2	3
7	Analisis Keuangan Daerah Ahli Muda		1	1
Jumlah		17	19	36

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan, maka terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop, Seminar dan sejenisnya

1.2.3 Sumber Daya Keuangan

Untuk menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Inspektorat Kota Sibolga didukung dengan sumber daya anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.983.604.947,00 dan setelah perubahan DPA menjadi sebesar Rp.9.207.679.635 yang tercatat pada aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut.

Tabel 1.5
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Inspektorat Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Ber kurang
5.1	Belanja Operasi	9.983.604.947	9.207.679.635	(775.925.312)
5.1.01	Belanja Pegawai	7.496.592.131	7.416.288.411	(80.303.720)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.487.012.816	1.791.391.224	(695.621.592)
	Jumlah Belanja	9.983.604.947	9.207.679.635	(775.925.312)

1.2.4 Sarana dan Prasarana/ Aset

Inspektorat Kota Sibolga menempati gedung milik Pemerintah Kota Sibolga, yang berlokasi di jalan Srikandi No. 1 Kota Sibolga.
Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan yang tersedia yaitu :

Tabel 1.6
Jumlah Aset Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	2
2	Kendaraan Roda 2	9
3	LCD Proyektor	1
4	Kamera Digital	1
5	Scanner	2
6	Printer	12
7	Laptop	21
8	Mesin Penghancur Kertas	5
9	CCTV	1
10	Wireless	1
11	Meja Rapat	1
12	Meja Kerja	36
13	Kamera	2
14	Mesin Absensi	1
15	Lemari Kayu	11
16	Lemari Gantung	1
17	Televisi	2
18	Lemari Es	1
19	Brankas	1
20	Kursi Kayu	6
21	Kursi Besi (Chitose)	36
22	Kursi Putar	7
23	AC Split	10
24	Proyektor	1
25	Faximile	1
26	Soundsystem	1
27	Camera	3
28	Kipas Angin	3

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kota Sibolga masih kurang optimal, perlu dilakukan pengadaan karena baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil kinerja. Seperti Meja dan Kursi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pegawai,

Printer dan Laptop/PC masih kurang memadai sehingga perlu ditambah untuk mempercepat pekerjaan. Gedung perkantoran yang kurang memadai dalam hal luas dan fasilitas yang ada.

1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun;
2. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
4. Sebagai salah satu dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya

1.4 Dasar Hukum

Laporan kinerja Inspektorat Kota Sibolga ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) BAB adalah sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Inspektorat, gambaran singkat tentang Tugas pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Sistematika Penyusunan.

2. BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

3. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2024 antara lain dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran, analisis atas efisiensi anggaran dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4. BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu Tahun 2024 dan upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Rencana Strategi Inspektorat Kota Sibolga memuat Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Sibolga adalah "Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur" Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan karena Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2021-2026 akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel

Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas menuju masyarakat yang Makmur

Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga



agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City)

Misi 4 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun diluar Kota Sibolga.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-1.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Inspektorat adalah "Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen".

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.



Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					KONDISI SI KINERJA PADA AKHIR PERIO DE
							2022	2023	2024	2025	2026	
	"Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar, dan Makmur"	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel	Meningkatkan penyelenggar an pengawasan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP	92%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
					2. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPk	92%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
					3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.7	3,8	3,8	3,8	4,0	4,5	4,5
					4. Maturlas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
					5. Nilai Akuntabilitas OPD	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	6. Persentase Pelanggaran Pegawai	2,35%	2%	1,5%	1%	0,5%	0,4%	0,4%
	7. Level Kapabilitas APJP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8. Jumlah Temuan BPK	12	10	8	6	4	2	2
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	9. Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	92%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
	10. Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25%	82,25%	82,76%	83,25%	83,50%	83,75%	83,75%

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Instansi : Inspektorat Kota Sibolga
 Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur
 Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kota Sibolga

No	Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1.Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP	%	96
		2.Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK	%	96
		3.Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Skala	3,8
		4.Maturitas SPIP	Level	Level 3
		5.Nilai Akuntabilitas OPD	Nilai	AA
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	6.Persentase Pelanggaran Pegawai	%	1
		7.Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.Jumlah Temuan BPK	Jumlah	6
	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	9.Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	96
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,25



2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024 :



Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kota Sibolga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Tahunan	Pelaksanaan					Rp.
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	90%					8.674.269.544	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksana administrasi keuangan perangkat daerah						7.312.353.266	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	47	orang/ bulan	53	orang/ bulan	7.312.353.266	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.500.000	
	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (Penjurangan dan Pembentukan)	60	orang	orang	40	orang	45.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah						601.477.393	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	paket	3	paket	4.671.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	26.080.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	10.047.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	10.039.266
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiklanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiklanan yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	13.190.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	10	laporan	8	laporan	20	laporan	22	laporan			537.439.127
Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang													644.308.585
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan			275.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan			82.633.585
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan			561.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah													70.630.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit	2	unit	2	unit	3	unit	4	unit			57.270.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	3	unit	-	unit	3	unit	9	unit			13.360.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan		85%											267.624.196
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal													171.683.146
Pengawasan Kinerja Pemecutan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemecutan Daerah	30	laporan	-	laporan	10	laporan	20	laporan		laporan			21.237.800

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30	laporan	-	laporan	15	laporan	2	laporan	10	laporan	79.977.200
Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	6	laporan	-	laporan	6	laporan	-	laporan	-	laporan	4.925.600
Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	20	laporan	-	laporan	8	laporan	7	laporan	4	laporan	23.420.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	dokumen	-	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	42.122.446
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu											95.941.050
Penanganan Penyelesaian Kenegaraan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kenegaraan Negara/Daerah yang Ditangani	20	laporan	-	laporan	7	laporan		laporan	10	laporan	52.015.250
Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	laporan	-	laporan	3	laporan	10	laporan	15	laporan	43.925.800
PROGRAM PERUMUSAN KEBIDAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		85%									161.850.750
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi											161.850.750
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penganggaran dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	2	kegiatan	161.850.750



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Inspektur Kota Sibolga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
	Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1.Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP	96%
			2.Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK	96%
			3.Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,8
			4.Maturitas SPIP	Level 3
			5.Nilai Akuntabilitas OPD	AA
		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	6.Persentase Pelanggaran Pegawai	1%
			7.Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.Jumlah Temuan BPK	6



		Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	9. Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	96%
			10. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 480.117.850
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 300.796.900
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.202.690.197

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
	Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang transparan,	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP	96%
			2. Persentase Penyelesaian Tindak	96%



akuntabel dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pengawasan yang independen		lanjut Pengawasan BPK	
		3.Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,8
		4.Maturitas SPIP	Level 3
		5.Nilai Akuntabilitas OPD	AA
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	6.Persentase Pelanggaran Pegawai	1%
		7.Level Kapabilitas APIP	Level 3
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.Jumlah Temuan BPK	6
	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	9.Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	96%
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 267,624,196
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 161,850,750
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.674,269,544

2.4 Metode Pengukuran/ Manual Indikator Kinerja

Dalam aspek pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/ triwulan/ semester/tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Manual IKU berisi informasi karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU), definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan,



mengukur, mengevaluasi dan menganalisa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaiannya.

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Sibolga

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP	Persentase	Capaian rekomendasi/pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/ jumlah total temuan)x100%	Inspektorat
		1.2	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK	Persentase	Capaian rekomendasi/pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/ jumlah total temuan)x100%	
		1.3	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Skala	Ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat	Survei	
		1.4	Maturnitas SPIP	Level	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.	Di ukur dengan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi.	
2	Meningkatnya Indeks	1.5	Nilai Akuntabilitas OPD	Nilai	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan organisasi	LKE Sakip dari Inspektorat	BKD
		1.6	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen		(Jumlah ASN yang dikenai sanksi/ jumlah total ASN) x 100%	

Profesionalisme ASN Meningkat	1.7	Level APJP	Kapabilitas	Level	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APJP yang harus dimiliki APJP agar dapat mewujudkan peran APJP secara efektif	Melakukan action plan berdasarkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement) oleh APJP dan implementasinya untuk meningkatkan kapabilitasnya ke level berikutnya secara mandiri.	Hasil QA dari BPKP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.8	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	Memuat jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Pemeriksaan BPK	LHP BPK
4	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1.9	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada APJP	(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti / jumlah total kasus) x 100%	Inspektorat
		1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Survei	Inspektorat



2.5 Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran merupakan penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan belanja/ pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrument atau alat dalam mengevaluasi dan memonitor kinerja pemerintah untuk mencapai visi misi yang dituju. Adapun pagu anggaran belanja Inspektorat Kota Sibolga yang telah direncanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Daftar Perencanaan Anggaran Belanja Inspektorat Kota Sibolga
Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran	
	APBD 2024	Perubahan APBD
Belanja Tidak Langsung	7.496.592.131	7.416.288.411
Belanja Langsung	2.487.012.816	1.791.391.224
Total	9.983.604.947	9.207.679.635

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	TARGET (Rp)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1					2	3
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.674.269.544
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.312.353.266
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.312.353.266



6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.500.000
6	01	01	2,05	09	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.500.000
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.477.393
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.671.000
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.080.400
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.047.600
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.049.266
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.190.000
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.439.127
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang	644.308.585
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275.000
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	82.633.585
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.400.000
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.630.300
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.270.300
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	267.624.196
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	171.683.146
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21.237.800
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79.977.300
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	4.925.600
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	23.420.000
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42.122.446



6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.941.050
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.015.250
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	43.925.800
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	161.850.750
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	161.850.750
					TOTAL	9.103.744.490



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Inspektorat Kota Sibolga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Sibolga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Kota Sibolga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun cara melakukan pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan pertimbangan:

- a. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

- b. Adapun kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk. Contoh indikator kinerja: persentase pelanggaran pegawai. Rumus yang dipakai yaitu

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	≤50%	Kurang

Dalam Penilaian Kinerja tersebut, skala nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1) Sangat Baik :

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan maksimal kelulusan penilaian kinerja;

2) Baik :

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;

3) Cukup :

Menunjukkan pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;

4) Kurang :

Menunjukkan pencapaian / realisasi capaian belum memenuhi masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	96%	91,03%	94,82%	Baik
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	96%	80,42%	83,78%	Baik

		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,8	3,85	101%	Sangat Baik
		Maturitas SPIP	Level 3	2	67%	Cukup
		Nilai Akuntabilitas OPD	AA	Proses	Proses	
2	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2	67%	Cukup
		Persentase Pelanggaran Pegawai	1	0,12	188%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	6	Proses	Proses	
4	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	96%	100%	104%	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	82,06	98,57	Baik

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa target indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu :

1. Maturitas SPIP yang ditargetkan mencapai Level 3 namun realisasi nya tercapai pada Level 2 (capaian 67%) hal ini dikarenakan kurang optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan kerja, masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian resiko oleh satuan kerja, belum optimal dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin.
2. Kapabilitas APIP yang ditargetkan mencapai Level 3 namun realisasi nya tercapai pada Level 2 (capaian 67%), hal ini dikarenakan Prosedur pelaksanaan pengawasan yang terkait dengan Audit Kinerja belum sepenuhnya sesuai, Terbatas SDM dalam hal ini APIP memerlukan waktu yang Panjang dan cukup dalam pelaksanaan tugas evaluasi Kapabilitas APIP, kurang nya komitmen dan komunikasi, serta tidak terpenuhinya anggaran 1% dari APBD sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.
3. Pada saat Laporan ini disusun realisasi dan capaian terhadap indikator

Jumlah temuan BPK belum dapat disajikan karena masih belum audit oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui antara bulan Mei atau bulan April.

4. Nilai SAKIP untuk Inspektorat Daerah belum ada dikarenakan menunggu penilaian yang berupa LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capain
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	85	91,03	96	91,03	94,82%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	%	80,36	84,12	96	80,42	83,77%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Skala	3.93	3.92	3,8	3,85	101%
		Maturitas SPIP	Level	2	2	3	2	67%
		Nilai Akuntabilitas OPD	Nilai	A	A	AA	Proses	Proses
2	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN	Level Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	2	67%
		Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.13	0.17	1	0,12	188%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	11	10	6	18	300%

4	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100	100	96	100	104%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,25	82,67	83,25	82,06	98,57%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	91,03	98	92,89%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	%	80,42	98	82,06%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Skala	3,85	4,5	85,55
		Maturitas SPIP	Level	2	4	50%
		Nilai Akuntabilitas OPD	Nilai	Proses	AA	Proses
2	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN	Level Kapabilitas APIP	Level	2	4	50%
		Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,12	0,4	30%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	Proses	2	Proses
4	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100	98	102%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,06	83,75	97.98%

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	96	91,03	94,82%	Temuan tahun-tahun lama yang sulit ditindaklanjuti karena pihak-pihak yang terkait sudah tidak menduduki jabatan, pensiun dan mutasi.	Menyampaikan Surat Panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat TLHP APIP yang sesuai dengan rekomendasi.
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	96	80,42	83,78%	Temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan terdapat temuan tahun-tahun lama yang sulit ditindaklanjuti karena data dukung tidak ada dan pihak yang terlibat sudah meninggal sementara pengajuan penghapusan	Menyampaikan Surat Panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat TLHP BPK RI yang sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan upaya penyelesaian temuan tahun-tahun lama sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

						Panjang dan cukup dalam pelaksanaan tugas evaluasi Kapabilitas APIP, kurang nya komitmen dan komunikasi, serta tidak terpenuhinya anggaran 1% dari APBD sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.	
		Persentase Pelanggaran Pegawai	1	0,12	188%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	8	Proses	Proses		
4	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	96	100	104%	Seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Inspektorat Kota Sibolga	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	82,06	98,57%	Petugas dalam pelayanan sangat kompeten, Melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur, sopan dan ramah .	Pelayanan yang sudah baik dan sesuai dengan SOP agar dipertahankan dan ditingkatkan

Tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal yang dilakukan Inspektorat Kota Sibolga adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua OPD. Tahun 2024, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencapai Opini WDP. Hal ini perlu peningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pencapaian IKU.

Pelaksanaan kegiatan untuk mempertahankan Opini dan tindak lanjut temuan Pengawasan serta penyelesaian pengaduan masyarakat untuk dapat tercapainya kinerja sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Data pendukung penyelesaian tindaklanjut secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan jumlah temuan aparat pengawasan Inspektorat Kota Sibolga dan InpektoratPropinsi sampai dengan Tahun 2024

Tabel 3.6
Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan APIP Tahun 2024

No	APIP	Jumlah LHP	Temuan	Rekomen dasi	Sudah Selesai	Belum Selesai	%
1	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	11	123	156	142	14	91,03%
2	Inspektorat Kota Sibolga						
	JUMLAH						

b. Jenis dan jumlah temuan aparat pengawasan BPK per Desember Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 BPK-RI melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada bulan Februari sampai dengan Maret untuk pemeriksaan pendahuluan dan Maret sampai dengan April untuk pemeriksaan terinci.

Untuk pemeriksaan sebelumnya masih terdapat rekomendasi yang belum sesuai sehingga masih tetap dilakukan pemantauan setiap semester.

Tabel 3.7

Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
sampai dengan Tahun 2024

No	Keterangan LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Tindaklanjut			
				Sudah Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	LHP Investigasi dan Pelaksanaan APBD Kota Sibolga	28	57	47	10	0	0
2	LHP Perhitungan APBD TA 2005	7	16	16	0	0	0
3	LHP LKPD 2006	20	32	26	6	0	0
4	LHP Belanja 2006 dan 2007	12	19	17	0	2	0
5	LHP LKPD 2007	19	45	40	5	0	0
6	LHP LKPD 2008	17	42	39	3	0	0
7	LHP LKPD 2009	10	27	24	2	1	0
8	LHP LKPD 2010	13	37	31	6	0	0
9	LHP Kinerja Pendidikan TA 2010 dan 2011	10	26	23	3	0	0
10	LHP LKPD 2011	5	10	7	2	1	0
11	LHP Belanja TA 2012	2	8	4	4	0	0
12	LHP atas Formasi dan Pengadaan PNS Tahun	7	22	22	0	0	0
13	LHP LKPD 2012	11	22	17	5	0	0
14	LHP LKPD 2013	12	22	17	5	0	0
15	LHP LKPD 2014	17	24	16	8	0	0
16	LHP LKPD 2015	23	62	45	17	0	0
17	LHP Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD	10	22	17	5	0	0

	Tahun Anggaran 2011 s/d 2016						
18	LHP LKPD 2016	15	74	65	7	0	2
19	LHP LKPD 2017	16	71	70	1	0	0
20	LHP LKPD 2018	10	47	43	3	1	0
21	LHP Kinerja SSH Tahun 2018 dan 2019	7	9	5	0	0	4
22	LHP LKPD 2019	12	46	25	19	7	0
23	LHP LKPD 2020	14	105	76	28	1	0
24	LHP LKPD 2021	11	38	32	6	0	0
25	LHP LKPD 2022	10	27	17	7	3	0
26	LHP LKPD 2023	18	78	28	50	0	0
	Jumlah	336	991	797	178	10	6
	Persentase (%)			80,42%	17,96%	1,01%	0,61 %

c. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Tabel 3.8

Rekapitulasi Pengaduan dan Tindakanjutan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2024

No	Uraian Pengawasan	Proses
1	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait adanya dugaan kurangnya volume dan Penyelewengan dalam pembangunan proyek Pengembangan Jaringan Distribusi & Sambungan Rumah di Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga yang dilakukan oleh Dinas PU-PR pada APBD TA 2023; Nomor SPT : 700/01/11/SPT.T/2024	Telah ditindakanjuti
2	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait Pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga pada Dinas Perikanan Kota Sibolga TA. 2022; Nomor SPT : 700/11/IX/SPT.T/2024	Telah ditindakanjuti
3	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait :	Telah ditindakanjuti

	a. Dugaan kurangnya Volume terhadap pekerjaan ruang kelas SMP Negeri 5 Sibolga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Sibolga pada TA. 2021; b. Dugaan Fiktif dan pengurangan kualitas dan kuantitas terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Sibolga pada TA. 2022 dan TA. 2023 Nomor SPT : 700/06/VI/SPT.T/2024	
4	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait : a. Dugaan kurangnya Volume terhadap pekerjaan rehab parit di Jl. Com Yos Sudarso Kel. Kota Beringin Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga yang dilakukan oleh Dinas PU-PR Pemerintah Kota Sibolga pada TA. 2023; b. Dugaan Mark-Up harga dan Penyelewengan terhadap bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga JPS 2 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Sibolga pada TA. 2022. Nomor SPT : 700/07/VI/SPT.T/2024	Telah ditindaklanjuti
5	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait dugaan Mark-up harga dan penyelewengan terhadap bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga JPS Tahap 2 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Sibolga pada TA. 2022.; Nomor SPT : 700.10/VIII/SPT.T/2024	Telah ditindaklanjuti
6	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Dumas) terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga (PEN) oleh Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga TA 2022 Nomor SPT : 700.11/X/SPT.T/2024	Telah ditindaklanjuti
7	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DUMAS) terkait dugaan Penyelewengan dan Kurangnya Volume dalam Pembangunan Proyek Septi Tank skala Individual di Kelurahan Aek Parombunan, Kelurahan Aek Parombunan, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kelurahan Angin Nauli Kota Sibolga yang dilakukan Dinas PUPR Nomor SPT : 700.12/X/SPT.T/2024	Telah ditindaklanjuti

Bila diperhatikan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengaduandan pelimpahan kasus dari APH telah ditindaklanjuti semuanya

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran				Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,8	3,85	101%	PROGRAM PENYELANGGAAN PENGAWASAN	267.624.196	216.071.900	80,81%	19,26%
2	Maturitas SPIP	Level 3	2	67%					
3	Nilai Akuntabilitas OPD	AA	Proses	Proses					
4	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2	67%					
5	Persentase Pelanggaran Pegawai	1	0,12	188%					
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	82,06	98,57%					
7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	96	91,03	94,82	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750	122.146.700	75,46%	24,53%
8	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	96	80,42	83,78%					
9	Jumlah Temuan BPK	6	Proses	Proses					
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	96	100	104%					

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.10
Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan

No	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	101%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	104,6%		
2	Maturitas SPIP	67%					
3	Nilai Akuntabilitas OPD	Proses					
4	Level Kapabilitas APIP	67%					
5	Persentase Pelanggaran Pegawai	188%					
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%					
7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	94,82%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	92,87%		
8	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	83,78%					
9	Jumlah Temuan BPK	Proses					
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%					

Terdapat 2 program dan 3 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

- a) Penilaian Opini BPK terhadap Kepatuhan auditan (stakeholder) terdapat hasil pengawasan meningkat;

- b) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan kasus dari APH;
- c) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yaitu,
- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - ✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Capaian program Inspektorat tahun 2024 di rinci per program seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			(%)	(%)	(%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	85	104,6%	123%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	85	92.87%	109%

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang mendukung program strategis tersebut, yaitu:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Inspektorat Kota Sibolga di Tahun 2024 melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah TA. 2024

No	Uraian Pengawasan
1	Melakukan Monitoring Pengawasan Inflasi Triwulan Ke I TA. 2024 Kota Sibolga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/01/I/SPT.M/2024
2	Melakukan Monitoring Pengawasan Atas Penerimaan PPPK TA.2023 Tahap III Pengangkatan PPPK pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga

	Nomor SPT : 700/02/II/SPT.M/2024
3	Melakukan Monitoring Pengawasan Inflasi Triwulan Ke II TA. 2024 Kota Sibolga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/03/IV/SPT.M/2024
4	Melakukan Monitoring Pengawasan Inflasi Triwulan Ke III TA. 2024 Kota Sibolga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/04/VII/SPT.M/2024
5	Melakukan Monitoring Pengawasan atas Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05/IX/SPT.M/2024
6	Melakukan Monitoring Pengawasan Inflasi Triwulan Ke IV TA. 2024 Kota Sibolga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/06/IX/SPT.M/2024
7	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/01/VIII/SPT.R /2024
8	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/02/X/SPT.R /2024
9	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/03/X/SPT.R /2024
10	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD BPKPAD Kota Sibolga TA.2024 Nomor SPT : 700/20/X/SPT.R /2024
11	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) OPD BKD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05/X/SPT.R /2024
12	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD BAPPEDA Kota Sibolga TA.2024 Nomor SPT : 700/06/XI/SPT.R /2024
13	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Inspektorat Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/07/X/SPT.R /2024
14	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024

	Nomor SPT : 700/08/X/SPT.R /2024
15	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Perikanan, Ketahanan, Pangan dan Pertanian Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/09/X/SPT.R /2024
16	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/10/X/SPT.R /2024
17	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/11/X/SPT.R /2024
18	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga TA. 2024 Nomor SPT : 700/12/X/SPT.R /2024
19	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas PKPLH Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/13/X/SPT.R /2024
20	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/14/X/SPT.R /2024
21	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/15/X/SPT.R /2024
22	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Satpol PP Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/16/X/SPT.R /2024
23	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/17/X/SPT.R /2024
24	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/18/X/SPT.R /2024
25	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024

	Nomor SPT : 700/19/X/SPT.R /2024
26	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD BPKPAD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/20/X/SPT.R /2024
27	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD BPBD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/21/X/SPT.R /2024
28	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas PMKPP dan PA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/22/X/SPT.R /2024
29	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD RSUD Dr. FL. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/23/X/SPT.R /2024
30	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) pada OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Sat Pintu Kota Sibolga Nomor SPT : 700/24/X/SPT.R /2024
31	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Nomor SPT : 700/25/X/SPT.R /2024
32	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Sekretariat Daerah Kota Sibolga Nomor SPT : 700/26/X/SPT.R /2024
33	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Nomor SPT : 700/27/X/SPT.R /2024
34	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Nomor SPT : 700/28/X/SPT.R /2024
35	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada PD. SINA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/29/X/SPT.R /2024
36	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga Nomor SPT : 700/30/X/SPT.R /2024
37	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Dinas Parpora Kota Sibolga Nomor SPT : 700/31/X/SPT.R /2024

38	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Sibolga Nomor SPT : 700/32/X/SPT.R /2024
39	Melakukan Audit Ketaatan (Rutin) Lanjutan pada OPD Dinas Perhubungan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/33/X/SPT.R /2024
40	Melakukan Audit Kinerja Pemerintah Kota Sibolga pada OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Sibolga Nomor SPT : 700/01/V/SPT.Ak /2024
41	Melakukan Audit Kinerja Pemerintah Kota Sibolga pada OPD Dinas Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/02/IX/SPT.Ak /2024
42	Melakukan Audit Kinerja Pemerintah Kota Sibolga pada OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga Nomor SPT : 700/03/IX/SPT.Ak /2024
43	Melakukan Audit Kinerja Pemerintah Kota Sibolga pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/04/IX/SPT.Ak /2024

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Inspektorat Kota Sibolga pada Tahun 2024 melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2024

No	Uraian Pengawasan
1	Melakukan Penutupan Kas pada OPD RSUD Fl. Tobing, BPBD, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Nomor SPT : 700/01/I/SPT.PK/2024
2	Melakukan Penutupan Kas pada OPD Dinas PMKPP dan PA, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/02/I/SPT.PK/2024
3	Melakukan Penutupan Kas pada OPD Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Dinas KB Kota Sibolga

	Nomor SPT : 700/03/I/SPT.PK/2024
4	Melakukan Penutupan Kas pada OPD Sekretariat Daerah, BKD, BAPPEDA, Dinas Kependudukan dan Capil, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Nomor SPT : 700/04/I/SPT.PK/2024
5	Melakukan Penutupan Kas pada OPD BPKPAD, Satpol PP, Inspektorat, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05/I/SPT.PK/2024
6	Melakukan Penutupan Kas pada OPD Dinas PU dan PR, Dinas Perindag, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan Dinas Parpora Kota Sibolga Nomor SPT : 700/07/I/SPT.PK/2024
7	Melakukan Penutupan Kas BUD Pemerintahan Kota Sibolga Pada Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, Dinas PKPLH Kota Sibolga Nomor SPT : 700/06/I/SPT.PK/2024
8	Melakukan Penutupan Kas Pemerintahan Kota Sibolga Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/08/I/SPT.PK/2024

c. Reviu Kinerja

Inspektorat pada tahun 2024 melaksanakan reviu terhadap dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan sesuai dengan peta pengawasan, seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Riviu Kinerja TA. 2024

No	Uraian Pengawasan
1	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah, BKD, BAPPEDA, Dinas Kependudukan dan Capil, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga. Nomor SPT : 700/01/II/SPT.Lkjip/2024
2	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Tahun 2023 dan Perjanjian Tahun 2024 pada BPKPAD, Satpol PP, Inspektorat, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga

	Nomor SPT : 700/02/II/SPT.Lkkip/2024
3	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Tahun 2024 pada Dinas PMK dan PA, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/03/II/SPT.Lkkip/2024
4	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 pada Perjanjian Tahun 2024 pada RSUD. F.L Tobing, BPBD, Dinas Perizinan, Kantor Kesbang Nomor SPT : 700/04/II/SPT.Lkkip/2024
5	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 OPD pada Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan Dinas KB dan PA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05/II/SPT.Lkkip/2024
6	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 OPD pada Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, Dinas PKPLH dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga Nomor SPT : 700/06/VII/SPT. Lkkip /2024
7	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada OPD Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/07/VII/SPT. Lkkip /2024

d. **Reviu Keuangan**

Inspektorat pada tahun 2024 melaksanakan Reviu Keuangan terhadap dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan sesuai dengan peta pengawasan, seperti tabel berikut ini;

Tabel 3.14

Riviu Keuangan TA. 2024

No	Uraian Pengawasan
1	Melakukan Reviu atas Penundaan Belanja 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun 2024 ke OPD BPKPAD Kota Sibolga TA. 2024 Nomor SPT : 700/01/I/SPT.Re/2024

2	Melakukan Reviu atas Justifikasi Teknis, Timeline penyelesaian kegiatan, dan Corrective Action Plan (CAP) atas pengawasan kegiatan dan penggunaan dana Pinjaman PEN pada Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Sibolga Nomor SPT : 700/02/I/SPT.Re/2024
3	Melakukan Reviu BOK dan Silfa dan Kapitasi JKN TA. 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/03/II/SPT.Re/2024
4	Melakukan Reviu BPPD Pemerintah Kota Sibolga TA.2023 ke OPD BPKPAD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/04/II/SPT.Re/2024
5	Melakukan Reviu Dana BTT terkait Bantuan Sosial kepada abang becak dan Lansia dan Himpunan abang becak Sibolga (HABSI) Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05/III/SPT.Re/2024
6	Melakukan Reviu HPS pada proyek Belanja Obat-obatan lainnya pada OPD Dinas Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05.a/III/SPT.Re/2024
7	Melakukan Reviu HPS pada proyek Belanja Modal alat kedokteran umum pada RSUD Dr. Fl. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/05.b/III/SPT.Re/2024
8	Melakukan Reviu DAK 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Nomor SPT : 700/06/III/SPT.Re/2024
9	Melakukan Reviu Capaian Output dan SP2D Kegiatan DAK 2023 pada RS Dr. FL. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/07/III/SPT.Re/2024
10	Melakukan Reviu Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/08/III/SPT.Re/2024
11	Melakukan Reviu LPPD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/09/III/SPT.Re/2024
12	Melakukan Reviu Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/08/III/SPT.Re/2024

13	Melakukan Reviu Realisasi DAK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sibolga Nomor SPT : 700/10/III/SPT.Re/2024
14	Melakukan Reviu Rancangan Standar Satuan Harga (SSH) TA. 2025. Nomor SPT : 700/10.a/IV/SPT.Re/2024
15	Melakukan Reviu HPS pada proyek pemeliharaan berkala Jl. Merpati Kota Sibolga pada OPD Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/10.b/IV/SPT.Re/2024
16	Melakukan Reviu DAK Tahap I bidang jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sibolga Nomor SPT : 700/11/V/SPT.Re/2024
17	Melakukan Reviu HPS pada proyek rehabilitasi dyk sungai Aek Doras di Lingk. IV, Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara pada Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/11.a/V/SPT.Re/2024
18	Melakukan Reviu Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik 2024 pada RSUD Fl. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/12/VI/SPT.Re/2024
19	Melakukan Reviu Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik 2024 pada Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/13/VI/SPT.Re/2024
20	Melakukan Reviu RKPD tahun 2025 Pemerintah Kota Sibolga pada OPD BAPPEDA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/13.a/VI/SPT.Re/2024
21	Melakukan Reviu DAK Dinas Pendidikan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/14/VI/SPT.Re/2024
22	Melakukan Reviu DAK Jalan Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/15/VI/SPT.Re/2024
23	Melakukan Reviu BTT Kebakaran di Kelurahan Pancuran Gerobak dan Kelurahan kota Baringin Kota Sibolga Nomor SPT : 700/16/VI/SPT.Re/2024
24	Melakukan Reviu KUA-PPAS pada BPKPAD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/16.a/VIII/SPT.Re/2024

25	Melakukan Reviu Rancangan SBU, HSPK dan ASB Kota Sibolga Nomor SPT : 700/17/V/SPT.Re/2024
26	Melakukan Reviu HPS pada proyek peningkatan sarana pedagang Pasar Kota Baringin pada OPD Dinas Perindag Kota Sibolga Nomor SPT : 700/17.a/VI/SPT.Re/2024
27	Melakukan Reviu HPS pada proyek Rehabilitasi Toilet (jamban) beserta sanitasi SMP Negeri 4 Kota Sibolga (DAK) pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/17.b/VI/SPT.Re/2024
28	Melakukan Reviu HPS pada proyek pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Nomor SPT : 700/17.c/VI/SPT.Re/2024
29	Melakukan Reviu Kegiatan DAK Fisik tahap 2 pada RSUD Dr. FL. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/18/VI/SPT.Re/2024
30	Melakukan Reviu RPJPD 2025-2045 Pemerintah Daerah Kota Sibolga pada BAPPEDA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/18.a/XIII/SPT.Re/2024
31	Melakukan Reviu atas pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) TA. 2024/2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/18.b/XIII/SPT.Re/2024
32	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat DPRD, Kantor Perpustakaan, Kantor Kesbang Politik, dan Dinas PMKPP dan PA Kota Sibolga Nomor SPT : 700/20/IX/SPT.Re/2024
33	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan, BPBD dan Badan KB Kota Sibolga Nomor SPT : 700/21/IX/SPT.Re/2024
34	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada Rsu. Dr. Fl. Tobing, Dinas Sosial, Dina PMPPTSP Kota Sibolga Nomor SPT : 700/22/IX/SPT.Re/2024
35	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada BAPPEDA, Dinas Kependudukan dan Capil, Satpol PP dan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Nomor SPT : 700/23/IX/SPT.Re/2024

36	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada BPKPAD, Inspektorat, Kecamatan Sibolga Sambas, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/24/IX/SPT.Re/2024
37	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada BKD, setdakot, Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga Nomor SPT : 700/25/IX/SPT.Re/2024
38	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/26/IX/SPT.Re/2024
39	Melakukan Reviu RKA tahun Anggaran 2025 pada Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan, PKPLH, Dinas Parpora, Dinas Pendidikan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/27/IX/SPT.Re/2024
40	Melakukan Reviu Perubahan kedua Standar Biaya DPRD TA. 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Sibolga Nomor SPT : 700/28/IX/SPT.Re/2024
41	Melakukan Reviu Perubahan kedua Standar Biaya DPRD TA. 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Sibolga Nomor SPT : 700/28/IX/SPT.Re/2024
42	Melakukan Reviu Pelayanan Publik pada OPD Dinas Penanaman Modan, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor SPT : 700/30/IX/SPT.Re/2024
43	Melakukan Reviu atas kegiatan bidang SDA, PLP dan AM Sumber dana DAK TA. 2024 pada Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/31/IX/SPT.Re/2024
44	Melakukan Reviu SP2D BUD dan Volume capaian Output Tahap I Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/32/IX/SPT.Re/2024
45	Melakukan Reviu Perubahan keempat Standar Biaya Umum TA. 2024 sebelum ditetapkan menjadi peraturan walikota Sibolga Nomor SPT : 700/32.a/IX/SPT.Re/2024
46	Melakukan Reviu Kegiatan DAK Fisik TA. 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/33/IX/SPT.Re/2024

47	Melakukan Reviu Optimalisasi Pajak pada BPKPAD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/34/IX/SPT.Re/2024
48	Melakukan Reviu Manajemen ASN pada BKD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/35/IX/SPT.Re/2024
49	Melakukan Reviu Berkas untuk pencairan dana bantuan untuk korban kebakaran di kelurahan Pasar Belakang pada OPD Dinas Sosial Kota Sibolga Nomor SPT : 700/36/X/SPT.Re/2024
50	Melakukan Reviu terhadap penetapan penerima bantuan sosial dan kriteria penerima bantuan sosial TA. 2024 dan TA. 2025 Kota Sibolga Nomor SPT : 700/37/X/SPT.Re/2024
51	Melakukan Reviu BAST Kegiatan DAK Fisik 2024 pada RSUD Dr. FL. Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/38/X/SPT.Re/2024
52	Melakukan : a). Reviu BTT Terhadap Perjalanan Dinas Wali Kota Sibolga Tahun 2024 b). Reviu BTT terhadap Perbaikan Mobil Dinas Kijang Inova BB 1039 N Tahun 2024 pada OPD BPKPAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor SPT : 700/39/X/SPT.Re/2024
53	Melakukan Reviu : 1. Perubahan pertama standar biaya DPRD TA.2024 2. Perubahan pertama 584 2025 Nomor SPT : 700/39.a/X/SPT.Re/2024
54	Melakukan Reviu APIP Ke-3 Bidang SDA, PLP dan AM Sumber Dana Dak Fisik TA. 2024 pada Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/40/X/SPT.Re/2024
55	Melakukan Reviu BTT Terhadap Kegiatan Peringatan Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024 Nomor SPT : 700/41/XI/SPT.Re/2024
56	Melakukan Reviu Sisa DAK Fisik Tahun 2018 s/d 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/42/XI/SPT.Re/2024
57	Melakukan Reviu Sisa DAK Fisik Tahun 2018 s/d 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga

	Nomor SPT : 700/43/XI/SPT.Re/2024
58	Melakukan Reviu Sisa DAK Fisik Tahun 2018 s/d 2023 pada Dinas PUPR Kota Sibolga Nomor SPT : 700/44/XI/SPT.Re/2024
59	Melakukan Reviu Sisa DAK Fisik Tahun 2018 s/d 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/45/XI/SPT.Re/2024
60	Melakukan Reviu Dana BTT untuk Perbaikan Listrik UPTD Puskesmas Aek Parombunan Sebesar Rp. 30.800.000,- Nomor SPT : 700/46/XI/SPT.Re/2024
61	Melakukan Reviu DAK Tahapan Bidang Jalan TA. 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Nomor SPT : 700/47/XI/SPT.Re/2024
62	Melakukan Reviu Kegiatan DAK Fisik 2024 Tahap 2 pada RSUD Dr. F. L Tobing Kota Sibolga Nomor SPT : 700/48/XI/SPT.Re/2024
63	Melakukan Reviu BTT acara Natal Oikumene Th. 2024 Nomor SPT : 700/49/XI/SPT.Re/2024
64	Melakukan Reviu BTT terhadap Kegiatan Upacara Hari Pahlawan di Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor SPT : 700/50/XI/SPT.Re/2024
65	Melakukan Reviu BTT terhadap Kegiatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sibolga Nomor SPT : 700/51/XI/SPT.Re/2024
66	Melakukan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2024 Nomor SPT : 700/52/XI/SPT.Re/2024
67	Reviu BTT Pemberian Penghargaan tali asih untuk Atlet yang Berprestasi Th 2024 Nomor SPT : 700/53/XI/SPT.Re/2024
68	Reviu Hasil Temuan BPK atas Kelebihan Biaya Transport Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sibolga Nomor SPT : 700/54/XI/SPT.Re/2024

69	Reviu Hasil Temuan BPK biaya Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/55/XI/SPT.Re/2024
70	Reviu Hasil Temuan BPK Th. 2015 Judul: Pemerintah Kota Sibolga belum Sepenuhnya melakukan Pemantauan atas Pemetahan Masalah BUMD Nomor SPT : 700/56/XI/SPT.Re/2024
71	Reviu hasil Pemeriksaan BPK Th. 2013 atas Pengadaan Tanah pada Pemko Sibolga TA. 2012 Tidak Sesuai ketentuan pada OPD BPKAD Kota Sibolga Nomor SPT : 700/57/XII/SPT.Re/2024
72	Reviu Hasil Pemeriksaan BPK Th. 2020 atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Sumbangan Dana Covid 19 pada Sekretariat Daerah & Inspektorat Kota Sibolga Nomor SPT : 700/58/XII/SPT.Re/2024
73	Reviu BTT Pencairan Perjalanan Dinas Setdakot Tth. 2024 Rp. 47.227.378,- Nomor SPT : 700/59/XI/SPT.Re/2024
74	Reviu Daftar BAST Sekaligus Rekomendasi DAK Th. 2024 pada Diknas & Kebudayaan Nomor SPT : 700/60/XII/SPT.Re/2024
75	Reviu BTT Terhadap Pencairan SPPD Wali Kota & Wakil Wali Kota Th. 2024 Nomor SPT : 700/61/XII/SPT.Re/2024
76	Reviu SP2D dan Volume Capaian Output Tahap II Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor SPT : 700/62/XII/SPT.Re/2024
77	Reviu BTT Terhadap Dana Dukungan Logistik untuk Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Nataru & Operasi Perbantuan Kepada Polri dalam Penanganan Kejahatan di Wilayah Kota Sibolga Nomor SPT : 700/63/XII/SPT.Re/2024

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP

Inspektorat pada tahun 2024 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP, seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.15

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

No	Uraian Pengawasan
1	Reviu Hasil Temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran Biaya Transport Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sibolga Nomor SPT: 700/54/XI/SPT. Re/2024
2	Reviu Hasil Temuan BPK RI Biaya Transport Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sibolga Nomor SPT: 700/55/XI/SPT. Re/2024
3	Reviu Hasil Temuan BPK RI atas Tahun 2015 Judul: Pemerintah Kota Sibolga Belum Sepenuhnya Melakukan Pemantauan atas Pemecahan Masalah BUMD Nomor SPT: 700/56/XI/SPT. Re/2024
4	Reviu Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Tahun 2013 atas Pengadaan Tanah Pemko Sibolga TA 2012 Tidak Sesuai Ketentuan pada OPD BPKAD Kota Sibolga Nomor SPT: 700/57/XI/SPT. Re/2024
5	Reviu Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Tahun 2020 Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Sumbangan Dana Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kota Sibolga Nomor SPT: 700/58/XI/SPT. Re/2024
6	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Khusus) Lanjut atas Pertanggung Jawaban Barang dan Jasa sebesar Rp 16. 933.113.234 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga TA 2023 Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai dengan Kondisi Senyata Berdasarkan Rekomendasi LHP BPK Nomor 51.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 Kota Sibolga Nomor SPT : 700/08/VIII/SPT.T/2024
7	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Khusus) atas Persediaan pada RSUD F.L Tobing sebesar Rp 748.682.516.000 berdasarkan Rekomendasi LHP BPK No. 51.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 Nomor SPT : 700/05/VI/SPT.T/2024

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang mendukung program strategis tersebut, yaitu:

a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Inspektorat pada tahun 2023 melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terdiri dari : Pemeriksaan Kasus Pengaduan

Masyarakat, Pemeriksaan Investigatif, Penjatuhan sanksi administratif, Pengawasan terhadap Displin PNS/ASN, Serah Terima Jabatan dan lain sebagainya, seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024

No	Uraian Pengawasan
1	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tentang dugaan Mark-up harga terhadap 6 paket pekerjaan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Sibolga pada Anggaran APBD TA. 2022 dan TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Modal Mebel dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 111.432.000; b. Belanja kendaraan bermotor penumpang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.484.000; c. Pengadaan belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat (DID) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 193.295.400; d. Pengadaan belanja modal mebel (DID) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 193.246.500; e. Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor (Steling) (DID) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 194.472.000; f. Pengadaan alat / bahan untuk kegiatan perabot kantor (DID) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.422.933. Nomor SPT : 700/09/VII/SPT.T/2024
	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait: a. Pemeliharaan Berkala Jl. Jati Kota Sibolga b. Pemeliharaan Berkala Jl. Mahoni c. Pemeliharaan Berkala Jl. S. Perman d. Pemeliharaan Berkala Jl. Zainul Arifin e. Rehap Trotoar Jl. Ahmad Yani f. Rehap Parit Jl. Bukit Barisan Pembangunan Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan rumah di Kelurahan Aek Parumbunan Nomor SPT : 700/13/X/SPT.T/2024
3	Melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap: a) Pembangunan liar /illegal Pasar Sibolga nauli berupa Kanopi di dalam Pasar Sibolga Nauli Tahun 2024 b) Penyelewengan terhaap genset pasat, CCTV, Eskalator dan TV CED bekas pasar lama Sibolga Nomor SPT : 700/14/XII/SPT.T/2024

b. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Inspektorat pada tahun 2024 melaksanakan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR). Dengan menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI serta melakukan pembebanan terhadap aset-aset hilang.

Tabel 3.17

Matriks Tindak Lanjut SKTJM Tahun Anggaran 2024

No	SKTJM	NAMA	URAIAN	Nilai SKTJM
1	007/VII/MP TP-TGR/2023	SELAMAT	Kendaraan dinas Roda 2 BK 7984 D	Rp 500.000
2	008/VII/MP TP-TGR/2023	FIRMAN LAROSA	Kendaraan dinas Roda 2 BB 2704 N	Rp 3.000.000
3	009/VII/MP TP-TGR/2023	AMRIL LUBIS	Kendaraan dinas Roda 2 BB 2611 N	Rp 2.500.000
4	010/VII/MP TP-TGR/2023	ANWAR SADAT	Kendaraan dinas Roda 2 BB 2693 N	Rp 3.000.000
5	011/VII/MP TP-TGR/2023	MAKMUR HUTABARAT	Kendaraan dinas Roda 4 BB 108 N	Rp 5.000.000
6	012/VII/MP TP-TGR/2023	YUSRIZAL EFENDI BARUS	Kendaraan dinas Roda 2 BB 2939 N	Rp 4.000.000

3.2 Realisasi Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Tahun 2024 di Inspektorat Kota Sibolga telah di alokasikan anggaran melalui P.APBD Kota Sibolga TA 2024 sebesar Rp. 9.103.744.490 (Sembilan milyar seratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 8.357.821.481 (Delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) 91,80%.

Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran sebesar Rp. 7.416.288.411,- (Tujuh milyar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) terealisasi Rp. 7.150.403.913,- (Tujuh milyar seratus lima puluh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

2. Belanja Langsung.

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.791.391.224,- (Tiga milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.207.417.568,- (Satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18

Capaian anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.674.269.544	8.019.602.881	92,45%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.312.353.266	7.150.403.913	97,78%
i	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.312.353.266	7.150.403.913	97,78%
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.500.000	0	0%
i	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.500.000	0	0%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.477.393	333.207.518	55,40%
i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.671.000	4.155.000	88,95%

ii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.080.400	25.155.500	96,45%
iii	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.047.600	8.892.800	88,50%
iv	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.049.266	4.075.000	40,55%
v	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.190.000	13.177.000	99,90%
vi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.439.127	277.752.218	51,68%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang	644.308.585	510.515.760	79,23%
i	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275.000	183.500	66,73%
ii	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.633.585	52.132.260	63,09%
iii	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.400.000	458.200,000	81,62%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.630.300	25.475.690	36,06%
i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.270.300	17.930.690	31,06%
ii	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	7.545.000	56,47%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	267.624.196	216.071.900	80,74%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	171.683.146	125.407.700	80,73%
i	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21.237.800	19.103.300	89,57%
ii	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79.977.300	79.650.000	99,59%
iii	Reviu Laporan Kinerja	4.925.600	3.376.800	68,55%
iv	Reviu Laporan Keuangan	23.420.000	23.077.100	98,53%
v	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42.122.446	200.500	0,47%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.941.050	90.664.200	94,50%
i	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.015.250	47.865.900	92,02%
ii	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	43.925.800	42.798.300	97,43%

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750	122.146.700	75,46%
3.1	Pendampingan dan Asistensi	161.850.750	122.146.700	75,46%
i	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	161.850.750	122.146.700	75,46%
Total		9.103.744.490	8.357.821.481	91,80%

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			% - / +
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-5)
1	Belanja Tidak Langsung	6.713.722.406,-	6.414.910.814,-	96%	7.416.288.411	7.150.403.913	96,41 %	0,41%
2	Belanja Langsung	3.099.815.607	2.745.123.817	89%	1.791.391.224	1.207.417.568	67,40 %	(21,6%)
	Total.....	9.813.538.013	9.160.034.631	93%	9.207.679.635	8.357.821.481	90,77 %	(2,23%)

Jumlah anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 1.455.716.532,- atau sebesar 14,83%.

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode					KEUANGAN/ANGGARAN (Rp)				Indikator Kinerja	KINERJA		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA/SILPA (Rp)	%		TARGET	REALISASI	%
1					3	4	5	6	7	8	9	10
2												
6												
6	01											98%
6	01	01			8.674.269.544	8.019.602.881	654.666.663	92,45%	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah			100%
6	01	01	2,02		7.312.353.266	7.150.403.913	161.949.353	97,78%	Persentase terlaksana administrasi keuangan perangkat daerah			100%
6	01	01			7.312.353.266	7.150.403.913	161.949.3532	95,55%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/ bulan	51 orang/ bulan	100%
6	01	01	2,05		45.500.000	0	45.500.00	0%	Persentase terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%
6	01	01	2,05	09	45.500.000	0	45.500.000	0%	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (Penjenjangan dan Pembentukan)	60 orang	60 orang	100%

6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.477.393	333.207.518	268.269.875	55,40%	Persentase terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.671.000	4.155.000	516.000	88,95%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	12	paket	100%
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.080.400	25.155.500	924.900	96,45%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	12	paket	100%
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.047.600	8.892.800	1.154.800	88,50%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	12	paket	100%
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.049.266	4.075.000	5.974.266	40,55%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	12	paket	100%
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.190.000	13.177.000	13.000	99,90%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	12	paket	100%
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.439.127	277.752.218	259.686.909	51,68%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	60	laporan	100%
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang	644.308.585	510.515.760	133.792.825	79,23%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang					100%
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275.000	183.500	458.500	66,73%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100%
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.633.585	52.132.260	30.501.325	63,09%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100%
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.400.000	458.200.000	103.200.000	81,62%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100%

6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.630.300	25.475.690	45.154.610.	36,06%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100%
6	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.270.300	17.930.6908	39.339.610	31,06%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit	11	unit
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	7.545.000	5.815.000	56,47%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	15	unit
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	267.624.196	216.071.900	51.552.296	80,74%					92%
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	171.683.146	125.407.700	46.275.446	73,05%					95%
6	01	02	2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21.237.800	19.103.300	2.134.500	89,57%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43	laporan	43	laporan
6	01	02	2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79.977.300	79.650.000	327.300	99,59%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	laporan	8	laporan
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Kinerja	4.925.600	3.376.800	1.548.800	68,55%	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7	laporan	7	laporan
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Keuangan	23.420.000	23.077.100	342.900	98,53%	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	77	laporan	77	laporan
6	01	02	2.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42.122.446	200.500	41.921.946	0,47%	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		dokumen		dokumen
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.941.050	90.664.200	5.276.850	94,50%	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				89%
6	01	02	2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.015.250	47.865.900	4.149.350	92,02%	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		laporan		laporan

6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	43.925.8000	42.798.300	1.127.500	97,43%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	28	laporan	93%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750	122.146.700	39.704.050	75,46%	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				100%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	161.850.750	122.146.700	39.704.050	75,46%	Persentase Pendampingan dan Asistensi				100%
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	161.850.750	122.146.700	39.7040500	75,46%	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	5	kegiatan	100%
						9.103.744.490	8.357.821.481	745.923.009	91,80%	Rata - rata capaian kinerja				
														98,73 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

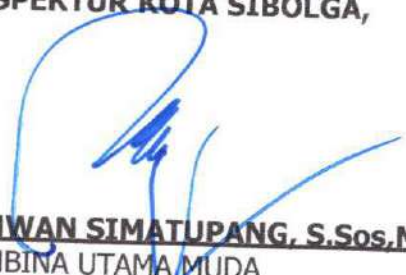
Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Sibolga disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024. Pada tahun 2024 ini Inspektorat Kota Sibolga berhasil mencapai kinerja pada skala nilai Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja 98,73%. Pencapaian ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kinerja harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.

Adapun terhadap Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yakni pada Indikator Kinerja Opini BPK. Penyebab utama tidak terpenuhinya target pada indikator kinerja Opini BPK dan Evaluasi LKjIP OPD adalah Pada saat Laporan ini disusun realisasi dan capaian terhadap indikator Opini BPK belum dapat disajikan karena masih belum audit oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui antara bulan maret atau bulan April;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Sibolga Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

INSPEKTUR KOTA SIBOLGA,



ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos.MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196604011986021002